



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI I DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2009 - 2010
KE PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TANGGAL 7 - 9 JULI 2010**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Setiap Reses Masa Persidangan, Komisi-komisi DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 huruf (f) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009 – 2010, Komisi I DPR RI telah membentuk 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja, yaitu Kunjungan Kerja ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam laporan ini akan disampaikan mengenai Laporan Tim Kunjungan Kerja Ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : .../PIMP/III/2009-2010 tanggal 2010 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I Sampai Dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok Dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI khususnya permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 – 2010.

D. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Juli 2010, dengan komposisi keanggotaan Tim yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang Anggota DPR RI dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Staf Ahli Komisi I DPR

RI, 2 (dua) orang Penghubung Dephan, dan 1 (satu) orang Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI.

Adapun komposisi keanggotaan Tim sebagai berikut :

Anggota Komisi I DPR RI :

1. H. Hayono Isman, S.Ip	Ketua Tim
2. Tri Tamtomo	Sekretaris Tim
3. Mirwan Amir	Anggota Tim
4. DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si	Anggota Tim
5. DR. HJ.Adjeng Ratna Suminar, SH, MH	Anggota Tim
6. Ir. Neil Iskandar Daulay	Anggota Tim
7. Tantowi Yahya	Anggota Tim
8. Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, B. Bus	Anggota Tim
9. Drs. H.A. Muchamad Ruslan	Anggota Tim
10. Drs. Enggartiasto Lukita	Anggota Tim
11. Paskalis Kossay, S.Pd, MM	Anggota Tim
12. Yorrys Raweyai	Anggota Tim
13. Helmy Fauzi	Anggota Tim
14. Evita Nursanty, M.Sc	Anggota Tim
15. Prof. DR. H. Irwan Prayitno, P.si, M.Sc	Anggota Tim
16. Ir. H. Azwar Abubakar, MM	Anggota Tim
17. Dra. HJ. Soemintarsih Muntoro, M.Si	Anggota Tim

Sekretariat dan Pendukung lainnya :

1. Dra. Damayanti	Set Komisi I DPR RI
2. Soraya	Set Komisi I DPR RI
3. Tubagus Erif	Staf Ahli Komisi I DPR RI
4. Denus Saptoaji	Pemberitaan Setjen DPR RI
5. Brigjen TNI Amat Bartono	Penghubung Dephan
6. Letkol KAV Enang R. Wongso	Penghubung Dephan

E. ACARA SELAMA KUNJUNGAN

1. Rabu, 7 Juli 2010

Pagi – Siang : - Pertemuan dengan Komisi Informasi Pusat
- Pertemuan dengan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AD, TNI AL, TNI AU
Tema : Bagaimana TNI menginginkan Postur TNI ideal yang diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan

Siang - Sore : - Pertemuan dengan Kepala Badan Pembekalan TNI, Cilincing
Tema : Apakah norma dukungan yang diterapkan saat ini telah tepat untuk menjawab tantangan tugas yang dirasakan semakin tidak ringan kedepan
- Peninjauan lapangan

2. Kamis, 8 Juli 2010

Pagi – Siang : - Pertemuan dengan Danjen Kopassus

Tema : Sejauhmana kesiapan perlengkapan satuan, kelompok, maupun perorangan yang dimiliki Kopassus dalam menciptakan prajurit Komando yang profesional

Siang - Sore : - Pertemuan dengan Dan YONKAV 7/Sersus dilanjutkan peninjauan lapangan
Tema : Sejauhmana kesiapan TOP yang dimiliki oleh YONKAV 7/Sersus (sesuai dengan standard yang ditentukan) dalam mendukung pelaksanaan misi *Peace Keeping* di luar negeri

- Pertemuan dengan Danjen Marinir dilanjutkan peninjauan lapangan
Tema : Kesiapan Satuan Marinir Pasmar II dalam upaya meniadakan ancaman terhadap kedaulatan NKRI

3. Jum'at, 9 Juli 2010

Pagi – Siang : - Pertemuan dengan Pang KOARMABAR
(Tema : Gugus tugas ideal yang diharapkan mampu untuk menjaga, mengamankan dan mengawal bingkai NKRI dikawasan barat) dan Dan KOLINLAMIL (Tema : Task Forces yang tersedia apakah mampu untuk melaksanakan operasi gabungan disaat yang bersamaan)

- Peninjauan Kolinlanmil di Tanjung Priok

Siang - Sore : - Pertemuan dengan Dan MENARHANUDSE/Falatehan
Tema : Mesin perang yang dimiliki oleh satuan ini masihkah efektif dan tepat hasil dalam mengemban misi Kohanudnas yang diharapkan

- Peninjauan Yon Arnudse Lagoa, Tj. Priok

- Pertemuan dengan Pang Kohanudnas
(Tema : Sejauhmana kemampuan Kosek Kohanudnas yang saat ini tergelar di 4 (empat) wilayah nusantara dalam melaksanakan pengamanan terhadap NKRI secara optimal) dan Pangko Ops AU (Tema : Apakah sarana angkutan yang dimiliki TNI AU untuk mendukung satuan PPRC bergerak ke daerah (*trouble spot*) telah sesuai dengan norma yang berlaku) dilanjutkan peninjauan lapangan.

- Peninjauan Wing I Lanud Halim Perdanakusumah

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) REPUBLIK INDONESIA

1. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, KIP memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi;
 - b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
 - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KIP didukung oleh regulasi internal dan eksternal.
 - a. Regulasi internal terdiri dari:
 - Tata Tertib Komisi Informasi Pusat
 - Kode Etik Komisi Informasi Pusat
 - Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat
 - Standar Operating Procedure (SOP) Komisi Informasi Pusat
 - b. Regulasi eksternal terdiri dari:
 - Pedoman Pembentukan Komisi Informasi Daerah
 - Pedoman Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasin Pusat
 - Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4. Terkait dengan regulasi tersebut, khususnya regulasi eksternal perihal Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, KIP belum memilikinya. Karena itu, fokus utama tugas pokok dan fungsi KIP adalah pada tahapan sosialisasi eksistensi organisasi, baik pusat maupun daerah beserta kewenangan maupun tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.
5. Hingga saat ini, ada 10 propinsi yang telah berinisiatif membentuk Komisi Informasi di tingkat daerah dimana 2 diantaranya terbentuk, dan 8 lainnya sedang dalam proses seleksi.
6. Sebagai langkah sosialisasi pentingnya keberadaan komisi informasi, KIP telah melakukan kunjungan ke 16 propinsi yaitu: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap Badan Publik diwajibkan membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas sebagai pejabat yang memberikan layanan informasi kepada publik. Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi sudah ditetapkan dan telah terdaftar dalam berita negara. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar Badan Publik baru mulai bergerak mempersiapkan diri membentuk PPID setelah ada permintaan informasi dan muncul isue gugatan oleh pemohon atau publik.
8. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Badan Publik mulai membutuhkan hubungan konsultatif daripada pola-pola sosialisasi internal. Persoalan-persoalan yang kerap dibahas meliputi tiga hal, yakni:
 - Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - Teknis penetapan informasi yang dikecualikan
 - Status BUMN sebagai Badan Publik
9. Terkait konflik sengketa informasi publik hingga saat ini setidaknya sudah ada 8 (delapan) yang telah menyampaikan secara tertulis, namun baru dua jenis yang siap untuk masuk dalam taraf penyelesaian sengketa, sisanya membutuhkan klarifikasi. Selain itu, KIP menerima tembusan tentang permintaan informasi DIPA di 38 kementerian dan lembaga, dimana 3 kementerian dan lembaga telah memberikan informasinya sedangkan yang lain belum. Perkiraan Agustus 2010 akan masuk taraf penyelesaian sengketa. Selain itu, ada 147 Badan Publik yang diajukan permintaan oleh ICW, dalam proses menunggu respon.
10. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KIP didukung oleh infrastruktur sekretariat dan anggaran.
 - a. Sekretariat terdiri dari:
 - Struktur Sekretariat
 - Personel
 - Kantor Komisi Informasi Pusat
 - b. Anggaran untuk KIP adalah:
 - 2009: Rp. 5 M
 - 2010: Rp. 7,5 M
 - 2011: Rp. 10,0 M
11. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010 sehingga dengan demikian, KIP periode ini adalah KIP yang pertama kali hadir di Indonesia. Sebagai entitas baru, KIP memiliki banyak permasalahan atau kendala yang dihadapinya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah:

- a. Kesekretariatan: baik personnel maupun sarana dan prasarana kesekretarian belum memenuhi standar dan kurang mendukung kelancaran tugas KIP
 - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan tersedia sepuluh (10) pejabat struktural yang dapat dibantu oleh Jabatan Fungsional sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Namun hingga kini, hanya terdapat 5 pejabat struktural di KIP. KIP telah mengusulkan pejabat kesekretariatan dan telah disetujui, namun hingga saat ini belum dilantik. Keterbatasan personnel kesekretarian memaksa komisioner turut melakukan kerja teknis administratif yang dapat menghambat tugas pokok dan fungsinya yang utama.
 - Sekretariat yang digunakan oleh KIP saat ini merupakan gedung diklat milik Kementerian Komunikasi dan Informasi. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi hubungan antara KIP dan Kemkominfo dimana seharusnya, berdasarkan undang-undang, KIP berdiri sebagai lembaga mandiri. Fasilitas kesekretarian yang ada juga tidak memadai untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi KIP seperti tidak adanya ruang untuk mediasi, ruang sidang untuk penyelesaian sengketa, pengarsipan, daya listrik yang rendah dan sering mati serta lain-lain. Kondisi fasilitas dan gedung perkantoran seperti ini menciptakan kesan bahwa KIP berada dibawah payung atau naungan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
 - Lokasi perkantoran KIP saat ini berada di wilayah pinggiran Jakarta Barat dan sukar untuk diakses oleh publik sehingga perlu direncanakan untuk membangun gedung perkantoran baru yang lebih strategis dengan sarana dan prasarana yang memadai. Gedung perkantoran yang diharapkan adalah gedung tersendiri dengan lokasi strategis dan memiliki ruangan maupun fasilitas yang mendukung. Setidaknya, untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi KIP dibutuhkan luas bangunan sekitar 1000 m².
- b. Dalam proses pembentukan struktur PPID, banyak pejabat di badan publik menolak untuk masuk dalam struktur PPID karena kekhawatiran terjadi konflik atau sengketa yang membuatnya harus berperkara dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini terkait belum adanya piranti lunak berupa peraturan yang mengatur secara tegas mengenai informasi-informasi yang dikecualikan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
- c. Secara anggaran, alokasi dana yang diberikan kepada KIP tidak memadai. Untuk tahun anggaran 2011, pagu anggaran yang disediakan adalah 10 M (sepuluh milyar). Jumlah tersebut meliputi seluruh kegiatan termasuk rencana untuk sewa gedung yang berjumlah 2 M (dua milyar) per tahun. Diharapkan dana sewa gedung tersebut diambil dari alokasi lain yang tidak membebani anggaran kegiatan atau operasional rutin.
- d. Belum turunnya honorarium untuk para komisioner. Alokasi honorarium tersebut anggarannya telah disediakan berdasarkan

surat MenPAN kepada Menkeu Nomor: B/539/M.PAN-RB/3/2010 perihal Persetujuan Prinsip Pemberian Honorarium Bagi Anggota Komisi Informasi Pusat tertanggal 11 Maret 2010 namun hingga kini belum dapat diuangkan karena belum ada ketetapan dari Kementerian Keuangan.

B. BIDANG PERTAHANAN

A. MARKAS BESAR TNI

1. Markas Besar atau Mabes TNI merupakan *home-base* Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh seorang Panglima TNI dengan fungsinya sebagai pusat koordiansi operasional dan pembinaan seluruh angkatan dan personnel TNI. Terkait dengan pembangunan kekuatan atau postur ideal TNI yang diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan, TNI telah berupaya melakukan penyusunan berbagai rencana dan program.
2. Postur TNI dikembangkan dari doktrin dan strategi militer dengan memperhatikan geopolitik dan geostrategi Indonesia, serta karakteristik NKRI yang beragam etnik serta kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Faktor utama penyusunan desain postur TNI adalah ancaman terhadap kedaulatan Negara, keutuhan Wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.
3. Mencermati perkembangan lingkungan strategis dan dinamika ancaman ke depan, maka pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI perlu terus ditingkatkan dan bahkan dimasukkan sebagai salah satu prioritas program pembangunan nasional sebagai prasyarat utama untuk mampu merespon setiap bentuk ancaman baik yang bersifat aktual maupun potensial yang berimplikasi terhadap eksistensi kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara.
4. Ancaman aktual meliputi: keamanan selat malaka, terorisme, separatisme, pelanggaran wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, bencana alam, kegiatan ilegal, konflik horizontal dan kelangkaan energi. Sedangkan ancaman potensial meliputi: pemanasan global, pelanggaran alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), pencemaran lingkungan, pandemik, krisis finansial, *cyber crime* dan agresi militer asing.
5. Pembangunan postur ideal TNI secara bertahap akan dimulai pada Renstra ke II tahun 2010-2014 dengan mengedepankan prinsip trimatra terpadu. Sampai saat ini kondisi kesiapan alutsista trimatra TNI adalah sebagai berikut:
 - a. TNI AD 64% dengan rincian:
 - Personel sejumlah 356.635 orang
 - Senjata Ringan 163. 825 unit dengan tingkat kesiapan operasi 57,03%
 - Senjata Penerbad 67 pucuk dengan tingkat kesiapan operasi 67,00%
 - Meriam Armed 359 unit dengan tingkat kesiapan operasi 28,60%
 - Meriam Arhanud 389 unit dengan tingkat kesiapan operasi 11,62%

- Rudal Arhanud 70 unit dengan tingkat kesiapan operasi 19,59%
 - Ranpur Kavaleri 1.086 unit dengan tingkat kesiapan operasi 26,03%
 - Pes Terbang / Helikopter unit dengan tingkat kesiapan operasi 26,61%
- b. TNI AL 51% dengan rincian
- Personel sejumlah 74.110 org
 - KRI 148 unit dengan tingkat kesiapan operasi 44%
 - Kapal Angkatan Laut (KAL /Patkamla) 344 unit dengan tingkat kesiapan operasi 74%
 - Pes Terbang 62 unit dengan tingkat kesiapan operasi 22% terdiri atas:
 - Fixed wing 44 unit dengan tingkat kesiapan operasi 27 unit (61%)
 - Rotary wing 18 unit dengan tingkat kesiapan operasi 4 unit (22%)
 - Ranpur Marinir 422 unit dengan tingkat kesiapan operasi 45%
- c. TNI AU 59%
- Personel sejumlah 37.624 orang
 - Pesawat Tempur 68 unit dengan tingkat kesiapan operasi 28%
 - Pesawat Angkut / Intai 47 unit dengan tingkat kesiapan operasi 36 %
 - Pesawat Helikopter 38 unit dengan tingkat kesiapan operasi 53%
 - Pesawat Latih 57 unit dengan tingkat kesiapan operasi 54,4%
 - Radar Hanud 17 unit dengan tingkat kesiapan operasi 88%
 - Rudal Jarak Pendek 28 unit dengan tingkat kesiapan operasi 100%
 - Penangkis Serangan Udara 43 unit dengan tingkat kesiapan operasi 72%
6. Peta kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa rasio anggaran pertahanan masing-masing negara terhadap PDB-nya pada umumnya berada diatas 1 hingga 2 persen dengan alutsista yang sangat modern. Rasio pertahanan Indonesia terhadap PDB dibawah 1% dengan kondisi alutsista yang sudah tua atau kadaluarsa dan banyak diantaranya sudah tidak layak pakai.
7. Kebutuhan anggaran TNI pada setiap tahunnya rata-rata diusulkan sebesar Rp. 84,27 Triliun namun dalam realisasinya pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran TNI rata-rata pada renstra 2005-2009 sebesar Rp. 33,01 triliun atau 39,2% dari rencana kebutuhan.
8. Pada tahun 2011 diusulkan anggaran sebesar Rp. 76,03 triliun. Namun pagu indikatif yang ditetapkan hanya Rp.41,86 triliun atau hanya terdukung 55,05% dari rencana kebutuhan.

9. Secara nominal, anggaran pertahanan mengalami peningkatan namun sesungguhnya peningkatan tersebut terjadi pada belanja rutin, sementara kenaikan pada belanja modal sangat kecil sehingga tidak memberikan efek untuk modernisasi alutsista dan peningkatan profesionalitas prajurit. Prioritas peningkatan nominal ditekankan pada aspek peningkatan kesejahteraan personel sementara disisi lain, modernitas pemenuhan kebutuhan alutsista hingga melampaui *minimum essential forces* yang memiliki efek *deterrence* dan pendukung posisi tawar dalam dunia diplomasi belum dipenuhi. Akibatnya, Indonesia belum mampu menghadirkan postur pertahanan ideal yang kuat dan disegani oleh internasional.
10. Upaya pemenuhan alutsista juga mengalami hambatan karena masih adanya tindakan embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi ini diperparah dengan relatif masih rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan TNI. Pembelian alutsista dari luar negeri dengan menggunakan mekanisme kredit ekspor (KE) membutuhkan jalur dan birokrasi yang panjang dan biaya tinggi. Dalam konteks KE ini, perlu dibuat simulasi agar proses semakin cepat dengan cara memotong jalur-jalur yang tidak perlu sehingga dapat menghemat anggaran dan waktu.
11. Berdasarkan anjuran dan kebijakan pemerintah, TNI berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan alutsistanya melalui produk-produk dalam negeri yang dihasilkan oleh BUMNIS yang bergerak dalam bidang pertahanan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan peralatan atau spec yang dibutuhkan oleh TNI dengan kemampuan teknis yang dimiliki BUMNIS/BUMNIP sehingga menjadikan alutsista TNI tertinggal dan masih mengalami ketergantungan terhadap negara lain. Dengan demikian, perlu adanya dorongan kuat untuk menciptakan industri strategis pertahanan yang tangguh demi terwujudnya pertahanan ideal yang berbasis pada produk dalam negeri.
12. Dihadapkan pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista/alut lainnya, jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan bagi TNI untuk menjalankan tugasnya yaitu menegakkan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan menjaga keutuhan wilayah NKRI
13. Postur ideal TNI bagian dari pembentukan TNI yang profesional dan modern yang diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat untuk menunjang tugas-tugas pertahanan dalam bentuk operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) melalui fokus pengembangan prajurit TNI dan pembangunan Alutsista. Peningkatan profesionalisme prajurit TNI diimbangi dengan meningkatkan kesejahteraan melalui kecukupan penghasilan prajurit, penyediaan dan fasilitas rumah tinggal, jaminan kesehatan, peningkatan pendidikan dan penyiapan skema asuransi masa tugas. Untuk mencapai postur ideal tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai.

14. Postur TNI ideal:

- a. disusun berdasarkan strategi pertahanan negara, yang merefleksikan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan.
- b. dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan (*deterrence standard*), yakni postur TNI yang mampu menangkal dan mengatasi ancaman agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa.
- c. dikembangkan dalam pola tri matra terpadu serta dibangun dengan berbasis kemampuan (*capability based defence*) sesuai dgn kondisi kemampuan anggaran.
- d. dibangun berdasarkan kebutuhan pertahanan dihadapkan dengan besarnya ancaman yang diperkirakan akan dihadapi dalam kurun waktu tertentu (*threat based defence*).
- e. Mencerminkan kapabilitas pertahanan Indonesia dengan *deterrence standard* yang melebihi tingkat *minimum essential force*

15. Guna mencapai postur ideal tersebut, TNI telah merancang pembangunan postur dalam empat tahap

a. Tahap I

- Tahap ini adalah kondisi aman dan damai di berbagai wilayah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan yang ditandai dengan peningkatan kemampuan Postur dan struktur TNI.
- Berdasarkan perkiraan kemampuan dukungan anggaran pertahanan untuk alutsista riel pada tahap ini sebesar Rp. 70.144 triliun atau dalam dollar : \$ US 7,794,000,000. dengan rincian:

ALUTSISTA NOMINAL RIEL (dalam dolar)

TAHUN	TNI AD	TNI AL	TNI AU
	32%	32%	32%
TAHAP I			
2010	413	413	413
2011	447	447	447
2012	488	488	488
2013	543	543	543
2014	603	603	603
	2,494	2,494	2,494

PRIORITAS PENGADAAN ALUTSISTA TIAP MATRA

TNI AD	TNI AL	TNI AU
- Kostrad - Kopassus - Alat transportasi - Helly padat teknologi	- Patroli cepat - Angkut - Kapal selam	- Surveillance / radar - Trasportasi / angkut - Tempur udara-

- Kap Perorangan	- Kap atas air - Marinir	darat - Tempur udara-udara - Paskhas
------------------	-----------------------------	--

RENCANA PENGADAAN ALUTSISTA TIAP MATRA

SATUAN	JENIS ALUTSISTA	
TNI AD	Senjata Ringan	24.222 pucuk
	Senjata Armed	103 pucuk
	Senjata Arhanud	638 pucuk
	Senjata Kavaleri	45 pucuk
	Ranpur	405 unit
	Pesawat Terbang	10 unit
TNI AL	Kapal Selam	2 unit
	Kapal Perusak Kawal Rudal	4 unit
	Kapal Cepat Rudal	4 unit
	KAL	30 unit
	Pesawat udara	15 unit
TNI AU	Penggantian Hawk MK-53	14 unit
	Penggantian OV-10	18 unit
	Pesawat C-130	2 unit
	Satrad	4 Satrad
	PSU	4 Bat

b. Tahap II

- Tahap ini kondisi aman dan damai semakin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan semakin menguat dengan terbangunnya profesionalisme TNI serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan Alutsista TNI melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional
- Berdasarkan perkiraan kemampuan dukungan anggaran pertahanan untuk alutsista riel pada tahap ini sebesar Rp 115,724 T, atau dalam dollar : \$ US 12,858,000,000. dengan rincian:

ALUTSISTA NOMINAL RIEL (dalam dolar)

TAHUN	TNI AD	TNI AL	TNI AU
	31%	31%	31%
TAHAP II			
2015	647	647	647
2016	715	715	715
2017	790	790	790
2018	870	870	870
2019	964	964	964
	3,986	3,986	3,986

PRIORITAS PENGADAAN ALUTSISTA TIAP MATRA

TNI AD	TNI AL	TNI AU
- Kap Sat Kewil - Kendaraan Taktis - Padat Teknologi - Alat Transportasi - Helly - Kap Perorangan	- Angkut - Kapal Selam - Kap Atas Air - Marinir - Patroli Cepat	- Trasportasi / Angkut - Tempur Udara-Darat - Tempur Udara-Udara - Surveillance / Radar

RENCANA PENGADAAN ALUTSISTA TIAP MATRA

SATUAN	JENIS ALUTSISTA	
TNI AD	Senjata Ringan	24.004 pucuk
	Senjata Armed	134 pucuk
	Senjata Arhanud	498 pucuk
	Senjata Kavaleri	15 pucuk
	Ranpur	38 unit
	Pesawat Terbang	16 unit
TNI AL	Kapal Perusak Kawal Rudal	7 unit
	Kapal Cepat Rudal	4 unit
	Kapal Cepat Torpedo	2 unit
	KAL	60 unit
	Pesawat udara	29 unit
TNI AU	Pesawat Multirole Fighter	14 unit
	Angkut Ringan	2 Skadron
	Intai Strategis	1 Skadron
	Satrad	3 Satrad
	PSU	12 Bat

c. Tahap III

- Pada tahap ini telah terwujud rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan Pertahanan negara dng terwujudnya TNI yg profesional, terwujudnya sinergi kinerja dlm bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yg efektif disertai kemampuan industri pertahanan yg handal
- Berdasarkan perkiraan kemampuan dukungan anggaran pertahanan untuk alutsista riel pada tahap ini sebesar Rp. 202.083 T, atau dalam dollar : \$ US 22,454,000,000. dengan rincian:

ALUTSISTA NOMINAL RIEL (dalam dolar)

TAHUN	TNI AD	TNI AL	TNI AU
	31%	31%	31%
TAHAP III			
2020	1,067	1,067	1,067

2021	1,162	1,162	1,162
2022	1,364	1,364	1,364
2023	1,578	1,578	1,578
2024	1,790	1,790	1,790
	6,961	6,961	6,961

PRIORITAS PENGADAAN ALUTSISTA TIAP MATRA

TNI AD	TNI AL	TNI AU
- Kostrad - Kopassus - Alat Transportasi - Helly Padat - Teknologi - Kap Perorangan	- Kapal Selam - Kap Atas Air - Marinir - Patroli Cepat - Angkut	- Tempur Udara-Darat - Tempur Udara-Udara - Surveillance / Radar - Trasportasi / Angkut

RENCANA PENGADAAN ALUTSISTA TIAP MATRA

SATUAN	JENIS ALUTSISTA
TNI AD	Senjata Ringan 2.718 pucuk Senjata Armed 56 pucuk Senjata Arhanud 36 pucuk Senjata Kavaleri 18 pucuk Ranpur 1 unit Pesawat Terbang 7 unit
TNI AL	Kapal Perusak Kawal Rudal 11 unit Kapal Cepat Rudal 8 unit Kapal Cepat Torpedo 4 unit KAL 90 unit Pesawat udara 16 unit
TNI AU	Psw Tempur berbagai jenis Angkut 156 unit 1Skadron Intai/Kodal 1unit Radar 2 unit PSU 24 Bat

d. Tahap IV

- Tahap ini adalah tahap dimana terwujud Indonesia yang aman, damai dan bersatu dengan TNI yang profesional, kemampuan Alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit tinggi
- Berdasarkan perkiraan kemampuan dukungan anggaran pertahanan untuk alutsista riel pada tahap ini sebesar Rp. 379,860 T, atau dalam dollar : \$ US 42,207,000,000. dengan rincian:

ALUTSISTA NOMINAL RIEL (dalam dolar)

TAHUN	TNI AD	TNI AL	TNI AU
	30%	30%	30%

TAHAP IV			
2025	1,915	1,915	1,915
2026	2,077	2,077	2,077
2027	2,494	2,494	2,494
2028	2,905	2,905	2,905
2029	3,272	3,272	3,272
	12,662	12,662	12,662

PRIORITAS PENGADAAN ALUTSISTA TIAP MATRA

TNI AD	TNI AL	TNI AU
- Kap Sat Kewil	- Kapal Atas Air	- Tempur Udara
- Rantis	- Marinir	- Surveillance / Radar
- Padat Teknologi	- Patroli Cepat	- Transportasi / Angkut
- Alat Transportasi	- Angkut	- Tempur Udara-Darat
- Helly	- Kapal Selam	
- Kap Perorangan		

RENCANA PENGADAAN ALUTSISTA TIAP MATRA

SATUAN	JENIS ALUTSISTA
TNI AD	Senjata Ringan 2.718 pucuk
	Senjata Armed 56 pucuk
	Senjata Arhanud 36 pucuk
	Senjata Kavaleri 18 pucuk
	Ranpur 1 unit
	Pesawat Terbang 7 unit
TNI AL	Kapal Perusak Kawal Rudal 10 unit
	Kapal Cepat Rudal 8 unit
	Kapal Cepat Torpedo 4 unit
	KAL 70 unit
	Pesawat udara 21 unit
TNI AU	Pesawat Tempur Skadron 1
	Angkut Skadron 2
	Helikopter Skadron 1
	Radar 2 unit
	Rudal 6 Bat

B. BADAN PEMBEKALAN TNI

1. Badan Pembekalan (Babek) TNI merupakan salah satu Badan Pelaksana Pusat TNI yang berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI dengan tugas pokok menyelenggarakan pembekalan materii TNI terpusat dalam rangka pelaksanaan dukungan operasi TNI dan pendidikan integratif. Babek memiliki fungsi pengadaan, penyimpanan, distribusi materii TNI terpusat hasil pengadaan Babek TNI.

2. Dalam rangka mendukung kegiatan fungsi utama dan fungsi organik, Babek TNI dilengkapi sarana prasarana yang dimiliki dengan segala keterbatasannya antara lain :
 - a. Gedung perkantoran
 - b. Bangunan Sosial.
 - c. Gudang Simpan/timbun.
 - d. Bangunan Penunjang.
 - e. Bangunan Harwatmat.
 - f. Kendaraan bermotor

3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi TNI baik dalam bentuk operasi militer perang maupun selain perang, logistik memegang peranan yang sangat penting. Pelaksanaan pengadaan berpedoman kepada KEPPRES nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Panglima TNI No 27/X/2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa di lingkungan TNI. Babek TNI melaksanakan kegiatan pembekalan yang dilaksanakan oleh unsur staf pelaksana, terdiri dari:

a. Direktorat Pembekalan Makanan

- Berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Pangab nomor : Skep/590/VIII/1995 tanggal 24 Agustus 1995 tentang Naskah Sementara Standarisasi Ransum bahwa Prajurit TNI yang berada di Pangkalan menerima jatah Ransum dengan standar Kalori 3.500 kal, sebagai berikut :

No	Nama Bahan	Norma	Protein (gr)	Lemak (gr)	Hidrat Arang (gr)	Kalori (kal)
A	<u>Bahan Pokok</u>					
1	Beras	600	42	4,2	474	
2	Garam	20	--	--	--	
3	Gula pasir	50	--	--	40	
4	Margarine	10	--	18	--	
5	Kopi bubuk	5	--	--	--	
6	Teh	30	--	--	--	
7	Sabun cuci	50	--	--	--	
8	Rokok	7	--	--	--	
			42	22,2	514	2.423,8
B	<u>Bahan Lauk</u>					
1	<u>Pauk</u>	400	54,6	41,7	16,3	
2	Daging murni	400	12	0,6	26	
3	Sayur dalam klg	200	2,4	--	29,42	
	Buah dalam klg					
			69	42,3	104,88	1.076,28
	Jumlah					3.500

- Untuk mendapatkan kalori 3.500 tersebut negara menyediakan anggaran Rp. 40.000,-/orang per hari (sesuai Surat Edaran Perbendaharaan Depkeu Nomor SE-51/PB/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Uang lauk pauk anggota TNI, POLRI mulai TA. 2010) sehingga dana Rp. 40.000,-/ orang per hari tersebut bila dibelanjakan pada saat ini hanya mendapatkan sejumlah kalori 2.857 kal, sehingga masih kekurangan kalori 643 kal atau bila dihitung dalam rupiah masih terdapat kekurangan Rp. 13.701,-/ orang per hari (seperti tersebut dalam tabel dibawah)

No	Nama Bahan	Norma	Protein (gr)	Lemak (gr)	Hidrat Arang (gr)	Kalori (kal)	Nilai (Rp)
A	<u>Bahan Pokok</u>	600	42	4,2	474		3.771
1	Beras	20	--	--	--		500
2	Garam	50	--	--	40		4.650
3	Gula pasir	10	--	18	--		3.280
4	Margarine	5	--	--	--		2.000
5	Kopi bubuk	30	--	--	--		2.000
6	Teh	50	--	--	--		2.000
7	Sabun cuci	7	--	--	--		2.500
8	Rokok						
			42	22,2	514	2.423,8	
B	<u>Bahan Lauk Pauk</u>	400	54,6	41,7	16,3		24.000
1	Daging	400	12	0,6	26		5.000
2	murni	200	2,4	--	29,42		4.000
3	Sayur dalam klg						
	Buah dalam klg						
			69	42,3	104,88	1.076,2	
	Jumlah					3.500	53.701

b. Direktorat Pembekalan Perlengkapan

Bekal kaporsatlap yang diberikan untuk mendukung prajurit TNI dalam tugas operasi pengamanan daerah rawan, perbatasan dan pulau terluar serta operasi lainnya telah mencukupi dan sesuai dengan norma indeks yg berdasarkan Skep Panglima TNI nomor Skep/481/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang terdiri dari :

- Bekal awal Kaporsatlap sebanyak 32 jenis bekal.
- Bekal ulang Kaporsatlap sebanyak 10 jenis bekal.
- Bekal Kapsatlap sebanyak 19 jenis bekal.

Jika dihadapkan dengan tugas ke depan yang semakin tidak ringan maka bekal tersebut masih diperlukan tambahan bekal

husus untuk mendukung tugas pokok satuan, yang diajukan oleh kotama operasi sesuai daerah penugasannya.

c. **Direktorat Pembekalan Bahan Minyak dan Pelumas (BMP)**

Pembekalan BMP dilaksanakan berdasarkan Skep Panglima TNI nomor Skep/480/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006. Dukungan anggaran BMP yang dialokasikan untuk TNI dalam bentuk rupiah tidak mencukupi jika dihadapkan dengan rencana kebutuhan dalam bentuk kuantum, sehingga selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Demikian juga pengadaan bekal BMP dikenakan harga keekonomian, pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan BMP rutin digunakan untuk mendukung kegiatan operasi dan latihan.

Dalam pelaksanaannya, terkait pembekalan BMP, TNI selalu mengalami defisit anggaran dan hutang BMP TNI ke Pertamina sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp. 6.013.351.702.191,-

- Defisit anggaran untuk TA 2007 sebesar Rp. 1.461.758.000.000,-
- Defisit anggaran untuk TA 2008 sebesar Rp. 2.547.859.000.000,-
- Defisit Anggaran untuk TA 2009 sebesar Rp. 923.477.073.383,-
- Untuk TA 2010, perkiraan defisit anggaran sampai dengan TW III 2010 sebesar Rp. 51.485.045.390,-

d. **Direktorat Pembekalan Palkomlek**

Proses pembekalan di Ditbek Palkomlek berdasarkan Surat Perintah dari Panglima TNI atas dasar rencana kebutuhan dan pengajuan kebutuhan satuan operasi yang tergelar di bawah kendali Panglima TNI. Selanjutnya Ditbek Palkomlek sebagai pelaksana teknis pengadaan materiil, kegiatan perencanaan sampai dengan pengendalian kebutuhan materiil Palkomlek berada di tingkat Mabes TNI. Jenis pembekalan yang dilaksanakan, meliputi :

- Alat peralatan darat
- Alat peralatan laut
- Alat peralatan udara
- Alat peralatan khusus

e. **Direktorat Pembekalan Senmu**

- Pemenuhan kebutuhan bekal pokok (BP) munisi sesuai Skep Panglima TNI No. Skep/333/IX/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Munisi TNI sebagai berikut:

- Kebutuhan munisi kaliber kecil (MKK) adalah 6 x BP dengan dislokasi 3 BP di gudang pusat, 2 BP di gudang daerah/wilayah dan 1 BP di gudang satuan
- Kebutuhan munisi kaliber besar (MKB) adalah 3 x BP dengan dislokasi 1 BP di gudang pusat, 1 BP di gudang daerah/wilayah dan 1 BP di gudang satuan
- Kebutuhan MKK TNI 1 BP: 122.931.043 butir dari berbagai jenis sesuai dengan indeks bekal tiap senjata

- Kebutuhan MKB TNI 1 BP: 1.250.675 butir dari berbagai jenis sesuai dengan indeks bekal tiap senjata
- Kondisi nyata munisi yang dimiliki satuan jajaran TNI posisi Juni 2010

No	Jenis Munisi	Satuan	Kebutuhan BP	Nyata	Kurang
1.	MKK	Butir	737.586.284 (6 X BP)	201.606.910 (1,64 BP)	535.979.374 (4,36 BP)
2.	MKB	Butir	4.252.294 (3 X BP)	875.472 (0,7 BP)	3.376.822 (2,3 BP)

- Pengadaan munisi alokasi anggaran UO Mabes TNI TA. 2008, 2009 dan 2010 dihadapkan kebutuhan TNI:

No.	Jenis Munisi	Kebutuhan 1 BP (Rp.)	Kebutuhan 6 BP (Rp.)	Dukungan Anggaran (Rp)	Prosentase			
					1 BP	6 BP	1 BP	3 BP
1.	TA. 2008 a. MKK	532.922.571.766	3.197.535.430.596	80.367.589.000	15,1	2,5		
	b. MKB	3.710.730.471.200	11.132.191.413.600	10.250.000.000			0,3	0,1
2.	TA. 2009 a. MKK			88.920.784.000	14,7	2,8		
	b. MKB			39.616.488.000			1,1	0,4
3.	TA. 2010 a. MKK			89.641.540.000	16,8	2,8		
	b. MKB			88.322.900.000			2,4	0,8

- Dukungan anggaran UO Mabes TNI dihadapkan kebutuhan 6 BP MKK dan 3 BP MKB untuk pemenuhan kebutuhan munisi setiap tahun anggaran sebagai berikut:

No	T.A.	MKK (x 1000 Rp.)	MKB (x 1000 Rp.)	Total Duk (x 1000 Rp.)	Total Kebutuhan (x 1000 Rp.)	(%)
1.	2008	80.367.589,-	10.250.000,-	90.617.589,-	14.329.726.844,-	0,63
2.	2009	88.920.784,-	39.616.488,-	128.537.272,-	14.329.726.844,-	0,89
3.	2010	89.641.540,-	88.322.900,-	183.412.440,-	14.329.726.844,-	1,24

- Kebutuhan Munisi latihan (Common use) per tahun.
Kebutuhan munisi kaliber kecil untuk latihan menembak diambil salah satu sample munisi yang sering digunakan berdasarkan indeks kebutuhan minimal yaitu untuk latihan menembak dengan senjata perorangan senapan kaliber 5,56 mm dan pistol kaliber 9 mm :

No.	Jenis Munisi	Jumlah Personil (orang)	Indeks Latihan (butir)	Harga Munisi (Rp.)	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Mukal 9 mm	432.129	37	1.959,-	31.322.006.307,-	311.203.317.027,-
2.	Mukal 5,56 mm	432.129	253	2.560,-	279.881.310.720,-	

- Kebutuhan anggaran guna memenuhi bekal pokok munisi

No.	Jenis munisi	1 BP (Rp.)	Kekurangan (BP)	Kebutuhan Anggaran
1.	MKK	532,9 M	4,36	2,3 T
2.	MKB	3,7 T	2,7	10 T

- Kebutuhan Senjata perorangan dan dukungan anggaran untuk pengadaan senjata.
 - o Kebutuhan senjata perorangan guna memenuhi *Minimum essential Force (MEF)* sebagai berikut:
4.133 pucuk x Rp. 6.920.000,- = Rp.305.400.360.000,-
 - o Dukungan anggaran TA. 2008, 2009 dan 2010 dihadapkan pada kebutuhan anggaran senjata perorangan :

No.	TA.	Duk. Anggaran (Rp)	Kebutuhan MEF (Rp)	%
1.	2008	36.682.742.000	305.400.360.000	12,01
2.	2009	19.889.325.000	305.400.360.000	6,51
3.	2010	52.387.915.000	305.400.360.000	17,15

- Dukungan pengadaan Senmu dari alokasi anggaran KE:

No	Jenis Material	TA	Alokasi Anggaran
1.	Senjata a. Meriam Kaliber 30 mm 7	2006	USD 18 juta

	barrel		
	b. SMR K3 Kaliber 5,56 mm	2008	USD 8 Juta
2.	Munisi	2004	USD 3 juta
	a. Mukal. 105 mm HE M1		
	b. Rudal QW-3	2006	USD 50 juta
	c. Mukal. 105 mm KM1	2008	USD 9 juta

– Satuan angkutan:

Satuan angkutan Babek TNI bertanggung jawab melaksanakan kegiatan distribusi hasil pengadaan Mabes TNI sampai kepada satuan penerima tingkat Kotama dalam negeri maupun pengiriman bekal ke luar negeri, secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat. Dalam pelaksanaan tugasnya dihadapkan pada keterbatasan sarana angkutan sehingga harus bekerja sama dengan pihak ketiga atau memanfaatkan unsur-unsur dari ketiga angkutan dengan menyesuaikan jadwal kegiatan operasi secara maksimal dan terkoordinir.

4. Secara keseluruhan pelaksanaan pembekalan untuk mendukung operasi TNI oleh Babek TNI pada TA. 2010 berjalan dengan baik sesuai dengan rencana tetapi belum memenuhi norma dukungan yang harus diterima oleh prajurit.
5. Dihadapkan pada tantangan tugas TNI ke depan yang semakin kompleks, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Peningkatan alokasi anggaran uang lauk pauk prajurit guna memenuhi norma kalori yang dibutuhkan bagi prajurit.
 - b. Dukungan BMP agar diberikan dalam bentuk kuantum sesuai rencana kebutuhan dan penambahan pagu anggaran pada setiap tahunnya.
 - c. Pemenuhan munisi Bekal Pokok MKK dan MKB.

C. KOMANDO PASUKAN KHUSUS (KOPASSUS)

1. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah komando utama pembinaan (Kotama Bin) yang bertugas membantu Kasad dalam membina fungsi dan kesiapan operasional pasukan khusus serta komando utama operasional (Kotama Ops) yang bertugas menyelenggarakan operasi komando, operasi sandi yudha dan operasi penanggulangan teror sesuai perintah Panglima TNI dalam rangka mendukung tugas TNI.
2. Satuan operasional Kopassus terdiri dari Satuan Para Komando (2 group), Satuan Sandi Yudha, dan Satuan Penanggulangan Teror atau Sat-81 Kopassus dengan dislokasi yang tersebar di Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
3. Kebijakan pembangunan satuan kopassus berpedoman pada MEF dengan konsep perencanaan pertahanan berbasis kapabilitas (*capability based defence planning*) melalui:

- a. Peningkatan profesionalisme prajurit untuk meningkatkan efek daya tangkal dan posisi tawar yang tinggi negara Indonesia
 - b. Pemenuhan alutsista yang diharapkan mampu memenuhi minimal 60% dari TOP/DSPP dimana materil yang berasal dari pembuatan/pengadaan di bawah tahun 2000 tidak diperhitungkan lagi
 - c. Prioritas pembangunan yang disusun dalam 3 (tiga) renstra (2011 s.d. 2024) dengan sekala prioritas pada: senjata dan alat optik, alat komunikasi, alat angkut, alat perlengkapan perorangan dan alat perlengkapan khusus.
4. Dukungan anggaran untuk Kopassus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tetapi jika dibandingkan secara keseluruhan, anggaran tersebut sangat kecil, yakni hanya 0,28% dari APBN. Kondisi Kopassus saat ini, apabila dibandingkan antara tugas pokok dan perlengkapan alutsista yang ada, sangat terbatas dimana rata-rata pemenuhan perlengkapan alutsista, fasilitas latihan maupun pangkalan/perumahan adalah sebagai berikut:
- a. Kondisi Materil/Alutsista
 - Perlengkapan satuan: 28,3%
 - Perlengkapan kelompok: 36,53%
 - Perlengkapan perorangan: 33,02%
 - b. Kondisi Fasilitas Latihan (Faslat) Satuan
 - Faslat Satuan Parako: 83,3%
 - Faslat Satuan Sandha: 78,57%
 - Faslat Satuan Gultor: 60%
 - c. Kondisi Pangkalan/Perumahan
 - Mako/Denma/Grup-3/Sat-81 73%
 - Grup-1 Kopassus: 66%
 - Grup-2 Kopassus: 71%
 - Pusdikpassus: 65%
5. Terkait dengan kondisi Kopassus saat ini, Kopassus menyampaikan saran kepada Komisi I DPR RI untuk:
- a. Memberikan dukungan anggaran selama bertahap selama 3 renstra (2011 – 2024) untuk memenuhi alutsista/materiil sesuai rencana pemenuhan *minimum essential force* (MEF) yaitu 60 % TOP/DSPP
 - b. Memberikan dukungan bagi peningkatan anggaran latihan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan prajurit Kopassus
 - c. Memberikan dukungan bagi peningkatan dan pemenuhan fasilitas latihan/pangkalan dan kesejahteraan prajurit Kopassus

D. MARINIR

1. Korps Marinir (Kormar) merupakan salah satu Komando Utama Pembinaan TNI AL yang mengemban tugas pokok “Membina kekuatan dan kemampuan serta kesiapan operasional Korps Marinir sebagai pasukan pendarat Amphibi (Pasrat) TNI AL dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis serta operasi tempur lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI”.

2. Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, Korps Marinir mempunyai Visi dan Misi sebagai arah tujuan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan alat material, personel dan anggaran. Sedangkan tuntutan pelaksanaan tugas kedepan cenderung semakin meningkat dan kompleks.
3. Dalam struktur organisasi Marinir, ditingkat pimpinan terdapat satu komando, unsur pembantu pimpinan terdapat 1 inspektorat dan 5 staf fungsional dan unsur pelayanan terdapat 4 satuan pelayanan. Pada unsur pelaksana pusat terdapat 9 kedinasan, unsur kolaktama terdapat 2 satuan Pasmar dan untuk unsur kolak Kormar terdapat 6 satuan. Struktur organisasi seperti ini memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu disesuaikan menjadi lebih kuat untuk mempermudah pembinaan kesenjataaan dan mengeliminir beberapa kelemahan yang ada.
4. Gelar kekuatan Korps Marinir saat ini cukup strategis sebagai satuan yang mampu dikerahkan ke seluruh penjuru wilayah NKRI, namun masih terdapat kelemahan di wilayah tertentu khususnya untuk wilayah Papua (hanya terdapat 1 satuan Yonmarlan) dan tidak ada kekuatan statis di wilayah Kalimantan. Gelar yang ada masih belum merata dalam penyebaran kekuatan personel, hal ini dipengaruhi oleh pengembangan kekuatan yang statis menyesuaikan fasilitas yang sudah ada sebelumnya. Gelar kekuatan ini juga masih belum diimbangi dengan pembangunan sarana prasarana gedung dan instalasi pendukung, cenderung memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada. Karena itu, gelar kekuatan Kormar ke depan harus disesuaikan agar lebih strategis dan dinamis dengan cara memperpendek rentang komando serta melakukan pembentukan satuan-satuan Kormar di wilayah-wilayah strategis lainnya yang ditunjang dengan sarana prasarana maupun instalasi pendukung yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Dalam konteks gelar operasi, dihadapkan pada luas wilayah penugasan operasi dengan jumlah kekuatan personel Kormar saat ini, yaitu 20.768 orang (16.983 personel siap / 3.753 personel tidak siap) dengan personel yang saat ini berada di daerah penugasan (dalam negeri / luar negeri) yang berjumlah 908 orang, maka perbandingan tersebut tidak sebanding. Kekuatan ideal satuan tempur adalah 1/3 kekuatan melaksanakan penugasan operasi dan 2/3 kekuatan berada di basis, maka satuan yang seharusnya melaksanakan penugasan operasi adalah 5.661 orang (1/3 dari personel siap). Komposisi penugasan ini seharusnya dapat dipenuhi mengingat Indonesia memiliki banyak titik rawan perbatasan di daerah terpencil yang dekat dengan laut.
6. Korps Marinir telah terlibat dalam kancah perjuangan bangsa sejak tahun 1945. Segala bentuk operasi penegakan kedaulatan NKRI hampir seluruhnya terlibat, termasuk penugasan internasional sebagai pasukan misi penjaga perdamaian PBB. Namun saat ini status Komando Utama (kotama) Kormar masih sebatas sebagai kotama

Pembinaan yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra berada dibawah komando Kasal. Masalah yang dihadapi sebagai kotama Pembinaan dihadapkan tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks saat ini adalah jauhnya rentang birokrasi komando dan kewenangan operasi oleh Dankormar terhadap prajuritnya yang melaksanakan penugasan operasi, karena seluruh prajurit tersebut mempunyai status BKO kepada satuan / kotama Operasional.

7. Terkait dengan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF), Kormar berpedoman pada Peraturan Kasal nomor Perkasal/39/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 dengan komposisi kekuatan sebagai berikut :
 - a. 1 Batalyon Tim Pendarat Amfibi (BTP) Inti siap operasional dengan jumlah personel 1.745 orang yang dilengkapi dengan berbagai jenis ranpur
 - b. 1 BTP Cadangan siap operasional dengan jumlah personel 1.745 orang yang dilengkapi dengan berbagai jenis ranpur
 - c. 1 BTP siap operasional yang sewaktu-waktu di BKO-kan kepada Satgas PPRC TNI, dengan kekuatan 1.300 personel dilengkapi dengan berbagai jenis Ranpur.
 - d. 2 Batalyon siap operasional Kamdagri / tugas lainnya, dengan kekuatan masing-masing batalyon terdiri dari 914 personel dilengkapi dengan berbagai jenis Ranpur.
 - e. 1 Batalyon Infanteri Siaga Ibu Kota (*Stand by Force*) terdiri dari 650 personel dilengkapi dengan berbagai jenis Ranpur.
 - f. 2 Batalyon siap operasional dengan kekuatan masing-masing batalyon terdiri dari 650 personel yang setiap saat siap digerakkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan sebagai Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam (PRCPB-TNI) mengatasi bencana alam

8. Perbandingan antara kebutuhan ranpur Kormar sesuai MEF dan kekuatan ranpur yang dimiliki saat ini

Kebutuhan Ranpur Kormar sesuai MEF:

RANPUR	BTP MAR	PPRC	OPS BAN	BTP CAD	SIAGA IBU KOTA	KAMDAGRI	JUMLAH
TANKFIB	17	5	6	17	5	10	60
RRF	50	15	15	50	10	34	174
KAPA	10	5	10	10	-	-	35
ARH/BVP- 2	14	5	10	10	-	6	45
ROKET RM	6	5	5	3	-	-	19
	97	35	46	90	15	50	333

Kekuatan Ranpur Marinir saat ini

NO	JENIS RANPUR	KONDISI		JUMLAH	KESIAPAN
		SIAP PAKAI	RUSAK		%
1	TANK PT-76	0	67	67	-
2	TANK PT-76 (M)	42	12	54	77.78
3	TANK AMX-10 PAC 90	8	4	12	66.67
4	TANK RECOVERY	0	1	1	-
5	TANK RECOVERY BREM-2 EX.UKRAINA	0	3	3	-
6	PANSAM AMX 10P	16	9	25	64.00
7	PANSAM BTR-50P	4	21	25	16.00
8	PANSAM BTR-50P (M)	35	34	69	50.72
9	PANSAM BTR-50 PK	17	17	34	50.00
10	KAPA K-61	0	5	5	-
11	KAPA K- 61 (R)	17	9	26	65.38
12	KAPA PTS UKRAINA	3	6	9	33.33
13	PANSROD BTR-152	0	8	8	-
14	BTR - 80 A	8	4	12	66.67
15	KPR BM 14/17	0	27	27	-
16	ROKET RM 70/85 GRAD LONG KAL. 122 MM	3	6	9	33.33
17	SIZU NA-140	0	1	1	-
18	BVP – 2	9	12	21	42.86
19	BVP – 2K	0	2	2	-
20	VPV/ RECOVERY	0	2	2	-
21	LVT-7A1	10	0	10	100.00
	JUMLAH	172	250	422	40.76

9. Kondisi perumahan prajurit dan PNS di lingkungan Kormar

a. Rekapitulasi perumahan prajurit.

- Rumdis 6.995 personel(terdukung)
- Non Rumdis 13.977 personel.
- Kontrak/sewa 3.029 personel.
- Numpang 2.530 personel.
- Rumah Pribadi 6.331 personel.
- TWP 606 personel.
- KPR 1.554 personel.
- BTN 127 personel.

b. Rekapitulasi perumahan PNS.

- Rumdis 49 personel (terdukung)
- Non Rumdis 714 personel.
- Kontrak/sewa 352 personel.
- Numpang 80 personel.
- Rumah Pribadi 124 personel.
- TWP 33 personel.
- KPR 17 personel.
- BTN 108 personel.

- c. Saat ini tengah disusun rencana pembangunan rusunawa untuk para prajurit di Cilandak. Rencana ini perlu dukungan dari beberapa pihak, khususnya Komisi I DPR RI

10. Kendaraan Angkut

- a. Kondisi nyata.
 - Prajurit tidur luar 14.530 personel.
 - Kendaraan truk layak 31 unit.
 - Kendaraan bis layak 19 unit.
- b. Kondisi ideal.
 - Prajurit tidur luar 14.530 personel.
 - Kendaraan truk dan bis 415 unit
(dengan perhitungan 1 truk untuk dimuati 35 prajurit)
- c. Kekurangan kendaraan angkut prajurit menjadi 365 unit..

11. Kondisi Korps Marinir saat ini belum mencerminkan suatu kondisi kesatuan yang mampu menjawab tantangan tugas secara profesional dan proporsional sesuai dengan apa yang dituangkan dalam konsep penyempurnaan organisasi TNI AL yang berbasis pada Kekuatan Pokok Minimum atau *Minimum Assential Force* (MEF). Kondisi organisasi, personel dan alat material serta sarana penunjang operasional yang ada masih sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dari status kotama Kormar, luasnya wilayah penugasan, menurunnya kemampuan kendaraan tempur (Ranpur) yang ada, terbatasnya kendaraan angkut personel, terbatasnya sarana perumahan prajurit dan PNS Kormar serta rendahnya penghasilan/gaji prajurit

12. Agar dimasa depan Korps Marinir memiliki kemampuan yang dapat menjawab tantangan dan memenuhi tuntutan tugas secara berkualitas, maka diperlukan penyempurnaan postur Korps Marinir berdasarkan Kekuatan pokok minimal (MEF). Kekuatan pokok minimal tersebut akan efektif dan efisien dalam pencapaian tugas pokok apabila didukung oleh perubahan status kotama Kormar dari kotama Pembinaan menjadi kotama Operasional sesuai dengan situasi luasnya wilayah penugasan, peningkatan kemampuan kendaraan tempur melalui proses pengadaan baru dan penghapusan secara bertahap, penambahan kendaraan pengangkut personel, pembangunan perumahan prajurit dan PNS dengan sistem terpusat serta peningkatan penghasilan/gaji prajurit. Melalui penyempurnaan tersebut diharapkan Korps Marinir mampu diproyeksikan setiap saat ke seluruh wilayah NKRI dan internasional, baik dimasa damai maupun dimasa perang.

E. KOMANDO LINTAS LAUT MILITER

1. Komando Lintas Laut Militer atau Kolinlamil adalah Kotama Bin yang bertugas membantu Kasal membina fungsi dan kesiapan operasional tunggal angkutan laut TNI serta Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI baik dalam rangka OMP maupun OMSP sesuai perintah Panglima TNI dalam rangka mendukung tugas TNI.
2. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kolinlamil didukung oleh 18 KRI yang sebagian besar merupakan eks kapal perang dunia II

dimana pelaksanaan pembinaannya dibawah Satlinlamil Jakarta (10 unit) dan Surabaya (8 unit) yang terdiri dari:

- a. 8 jenis KRI AT
- b. 4 jenis KRI ATF
- c. 2 jenis KRI BU
- d. 3 jenis KRI BAP
- e. 1 jenis KRI LPD (1 jenis lagi rencananya akan diserahkan dari PT PAL INA pada tahun 2010)

Dari 18 KRI tersebut, 5 unit KRI dari jenis AT sudah non aktif dan telah diusulkan untuk dihapus dan 1 unit KRI jenis BAP telah dijadikan sebagai kapal spare part KRI lainnya (Tanjung Nusanive) sehingga mempengaruhi operasional Kolinlamil.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kolinlamil menemui berbagai hambatan, diantaranya usia unsur-unsur kolinlamil yang sebagian besar sudah tua (rata-rata 30- 65 tahun) dan belum dihapus buku sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang sangat besar, sedangkan dana pemeliharaan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan tuntutan operasi yang sangat tinggi sehingga kemampuan dan kondisi teknis menurun. Untuk mendukung intensitas operasi berdasarkan perkiraan kebutuhan kekuatan kolinlamil diperlukan tambahan unsur KRI sebanyak 25 kapal dengan pengadaan baru maupun program perpanjangan usia pakai/*repowering* dari berbagai jenis
4. Fasilitas pelabuhan di Mako Kolinlamil sangat terbatas, hanya dapat ditempati (sandar/beaching) 5 KRI dan KRI yang lain harus lego jangkar sehingga diperlukan sarana angkut air bagi ABK menuju KRI yang lego di luar pelabuhan.
5. Kondisi Mako Kolinlamil sangat rawan banjir, khususnya banjir rob yang menyebabkan air laut memenuhi jalan, lapangan apel dan masuk pada lantai 1 (satu) gedung Mako Kolinlamil. Kondisi ini selain mengganggu aktifitas kegiatan yang ada, juga merusak fasilitas perkantoran yang ada
6. Kondisi alutsista atau materiil khusus lainnya dan tingkat kesejahteraan yang ada pada Kolinlamil tidak memadai untuk memenuhi standar minimum essential force (MEF). Terkait dengan kondisi alutsista yang tidak memadai tersebut, Kolinlamil menyampaikan saran-saran kepada Komisi I DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mohon agar pengadaan alutsista/KRI baru sebagai pengganti alat yang sudah berusia tua
 - b. Mohon agar diberikan dana anggaran bagi pengembangan fasilitas untuk meninggikan Mako, sarana dan prasarana jalan serta lapangan apel
 - c. Diperlukan penambahan dermaga (faslabuh) dengan membangun dermaga baru untuk menampung jumlah KRI/unsur
 - d. Sangat diperlukan peremajaan unsur yang sudah berusia tua dan belum dihapus buku agar dapat mendukung operasional Kolinlamil.

F. KOMANDO ARMADA RI KAWASAN BARAT

1. Komando Armada RI Kawasan Barat atau Koarmabar adalah Kotama Bin yang bertugas membantu Kasal dalam membina fungsi dan kesiapan operasional intelijen dan tempur laut serta Kotama Ops yang menyelenggarakan operasi intelijen dan tempur laut baik dalam rangka OMP maupun OMSP sesuai perintah Panglima TNI dalam rangka mendukung tugas TNI.
2. Koarmabar memiliki kemampuan:
 - a. Intelijen:
Memiliki kemampuan untuk mengatasi, mencegah dan menindak spionase negara lain, sabotase instalasi penting dan objek vital, aksi teror bersenjata.
 - b. Pertahanan:
Memiliki kemampuan peperangan permukaan, bawah permukaan, Pernika, peperangan amfibi, pertahanan pantai dan peperangan khusus.
 - c. Keamanan:
Memiliki kemampuan penegakan hukum di laut dan pengamanan lalu lintas laut, kemampuan untuk membantu pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) serta bantuan kpd Polri & otoritas sipil. Kemampuan anti perompakan dan tindak kekerasan di laut.
 - d. Pemberdayaan Wilayah Pertahan Laut (Dawilhanla):
Memiliki kemampuan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan pemberdayaan potensi maritim strategis serta berbagai komponen cadangan lainnya guna mendukung kemampuan pertahanan negara di laut.
 - e. Dukungan:
Memiliki kemampuan Dukungan logistik operasi (dukungan fasilitas pangkalan, perbaikan, pemeliharaan, perbekalan dan perawatan personel), kemampuan pembinaan Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Informasi, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP), kemampuan dalam mendukung operasi kemanusiaan dan bantuan akibat bencana alam dan SAR.
3. Focal area Koarmabar adalah Selat Malaka, Laut Natuna (Laut Cina Selatan) dan Selat Karimata dengan dukungan kekuatan operasional dan alutsista Koarmabar saat ini adalah:
 - a. 41 KRI dengan status:
 - 15 siap operasi
 - 18 stand by, dan
 - 8 dalam kondisi rusak/tidak siap pakai
 - b. 21 Kapal Angkatan Laut
 - c. 144 Patroli Keamanan Laut
 - d. 6 Satuan
 - Satuan Kapal Eskorta
 - Satuan Kapal Ampfibi
 - Satuan Penyapu ranjau
 - Satuan Kapal Bantu
 - Satuan Kapal Patroli
 - Satuan Pasukan Katak

- e. Pangkalan:
 - 4 Pangkalan Utama (klas A)
 - 8 Pangkalan Klas B
 - 10 Pangkalan Klas C
 - 1 Pangkalan Khusus
 - 4 Fasharkan
 - 76 Posal
 - 12 Posal SatradDiantara pangkalan yang ada, 7 pangkalan tidak memiliki fasilitas pelabuhan.
- f. Personel berdasarkan DSP: 13.617 personel. Riil personel yang ada adalah 10.912 orang dengan rincian:
 - Arba : 3.837
 - Lant-I : 1.693
 - Lant-II : 686
 - Lant-III : 3.121
 - Lant-IV : 1.575

4. Beberapa permasalahan yang menonjol di Koarmabar adalah:

- a. Bidang Operasi dan Latihan
 - Kondisi teknis *Sewaco* dan *Platform* unsur-unsur KRI dibawah pembinaan Koarmabar telah mengalami penurunan tajam. Hal ini umumnya disebabkan oleh usia Alut Sista yang sudah cukup tua (lebih dari 25 tahun).
 - Masih banyak Pangkalan TNI AL yang belum memiliki fasilitas perbaikan dan sandar (dermaga) yang memadai, sehingga mempengaruhi kemampuan dukungan Pangkalan terhadap unsur-unsur yang beroperasi.
 - *Main Base* Koarmabar yang berada di Tanjung Priok Jakarta sudah tidak ideal lagi, selain tidak mampu memberikan dukungan sandar untuk KRI yang berpangkalan di Jakarta juga berstatus pinjam milik Pelindo.
 - Dukungan bahan bakar untuk unsur gelar sangat kurang sehingga mempengaruhi jadwal waktu operasi dan kemampuan jelajah unsur.
- b. Bidang Dukungan Logistik
 - Suku cadang MPK untuk kapal tipe Frosch dan untuk kapal tipe Kondor sudah langka dan mahal serta pabriknya sudah tidak beroperasi lagi, sehingga mempengaruhi pada jadwal pelaksanaan pemeliharaan.
 - Tidak ada dukungan gudang arsenal di wilayah barat, dukungan Senamo untuk seluruh KRI dan pendirat Koarmabar beserta jajarannya didukung dari gudang Arsenal Batu Poron Surabaya, sehingga penerimaan di Satuan pemakai relatif tidak tepat waktu.
 - Masih minimnya Fasilitas Perawatan Personil (Faswatpers) seperti tempat tinggal, Mess, rumah dinas dan rumah dinas jabatan.

5. Kondisi alutsista atau materiil khusus lainnya dan tingkat kesejahteraan yang ada pada Koarmabar tidak memadai untuk memenuhi standar *minimum essential force* (MEF). Jumlah kapal yang ada saat ini terdiri dari 41 KRI dari berbagai Klas plus 19 KAL (tipe

28M ke atas) sementara luas wilayah yang harus diawasi adalah. Idealnya, Koarmabar memiliki 96 KRI dengan kecepatan jelajah 14 knots dan endurance minimal 5 (lima) hari

G. KOMANDO PERTAHANAN UDARA NASIONAL

1. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanudnas bertugas menyelenggarakan upaya Hankam terpadu atas wilayah udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Kotama Ops lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan wilayah udara NKRI & menyelenggarakan pembinaan administrasi dan kesiapan operasi unsur-unsur Hanud TNI AU dan melaksanakan Siaga Ops untuk unsur-unsur Hanud dalam jajarannya dalam rangka dukung tugas pokok dan fungsi TNI.
2. Kohanudnas dipimpin oleh seorang panglima yang membawahi atau memberikan komando kepada 4 (empat) pelaksana siaga operasi yaitu Kosek I (Halim), Kosek II (Makasar), Kosek III (Medan) dan Kosek IV (Biak). Setiap Kosek dipimpin oleh seorang panglima dan membawahi 5 (lima) unsur, yaitu Radar, Fighter, Rudal, Arhanud dan KRI.
3. Unsur radar didukung oleh 17 kekuatan dimana jumlah radar untuk setiap kosek adalah
 - a. Kosek I : 6 Radar
 - b. Kosek II : 5 Radar
 - c. Kosek III : 4 Radar
 - d. Kosek IV : 2 Radar
4. Dalam pelaksanaan operasinya, unsur radar Hanud berintegrasi dan berkoordinasi dengan radar sipil. Khusus untuk kawasan timur (Kosek IV) jumlah unsur rudal saat ini masih sangat minim dan rencananya akan dibangun 3 radar di kawasan tersebut. Secara umum, jumlah unsur radar yang ada (dengan rencana tambahan 3 radar di Kosek IV) belum dapat memantau seluruh wilayah udara secara optimal sehingga perlu ditambah sesuai kebutuhan.
5. Unsur Fighter atau Tempur Sergap (TS) saat ini didukung oleh tiga pesawat tempur jenis Sukhoi, F-16, F-5 dan Hawk. Beberapa kondisi dari unsur TS tersebut banyak yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak tempur dan dalam keadaan rusak.
6. Jenis gelar kekuatan rudal jarak pendek dan meriam Hanud beserta dislokasinya saat ini adalah:
 - a. 4 Den Arhanud Rudal : Rapier dan Poprad
 - b. 7 Yon Arhanudse : MER. 57 MM
 - c. 3 Yon Arhanudri : MER 40 MM dan RBS 70
 - d. 2 RAI Arhanudri : MER 40 MM dan 20 MM
7. Unsur KRI yang berkemampuan pertahanan udara berjumlah 13 unit yang terdiri dari:
 - a. 4 KRI Sigma Class dengan tahun pembuatan 2005
 - b. 3 KRI Corvette Class dengan tahun pembuatan 1980
 - c. 6 KRI Van Speijk Class dengan tahun pembuatan 1970

8. Hampir setiap tahun selalu terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan terhadap wilayah udara nasional. Jenis-jenis pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah udara nasional diklasifikasikan pada tiga jenis, yaitu:
 - a. Pelanggaran Wiludnas
 - b. Pelanggaran *Air Defence Identification Zone (ADIZ)*
 - c. Laporan sasaran tidak dikenal (lasa X).Setidaknya sejak tahun 2009 hingga Juni 2010, terjadi 23 kali pelanggaran kedaulatan terhadap wilayah udara nasional
9. Diantara jenis pelanggaran yang ada, pelanggaran dengan jenis lasa X adalah pelanggaran yang paling banyak terjadi (11 kali). Kohanudnas tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengejar pesawat tersebut karena kemampuan serta wewenang yang ada sangat lemah. Lazimnya, lasa X muncul pada hari-hari libur dimana pejabat berwenang dan instansi terkait yang berkepentingan sukar dihubungi. Pangkohanudnas sendiri tidak memiliki wewenang dalam memberikan perintah tembak di udara terhadap lasa yang melanggar kedaulatan udara NKRI
10. Perkembangan teknologi wahana udara internasional saat ini adalah:
 - a. digunakannya teknologi *stealth* (pesawat siluman)
 - b. pesawat-pesawat tempur modern menggunakan sistem navigasi canggih
 - c. sistem persenjataan yang digunakan oleh pesawat tempur modern memiliki presisi yang tinggi
 - d. perang elektronika dengan menggunakan teknologi *jamming*Perkembangan teknologi tersebut tidak diikuti atau diimbangi oleh perkembangan teknologi dan alutsista udara nasional sehingga pertahanan udara nasional dengan mudahnya dapat disusupi oleh kekuatan asing dan melemahkan *deterrent effect*
11. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kohanudnas adalah:
 - a. Jalur komando yang tidak efektif. Secara teknis, dari beberapa unsur pertahanan udara yang ada, praktis hanya unsur radar saja yang melekat pada Kohanudnas. Sementara empat unsur lainnya (Fighter, KRI, Rudal dan Arhanud) adalah BKO atau berada di bawah kendali operasi setiap angkatan. Akibatnya, struktur dan jalur komando yang ada tidak berjalan efektif.
 - b. Usia pakai alutsista sudah tua dan tidak lengkap.
 - Secara kualitas dan kuantitas, jumlah alutsista yang dimiliki tidak memadai.
 - Untuk memaksimalkan pertahanan wilayah udara nasional, unsur tempur udara yang dibutuhkan adalah pesawat sejenis Sukhoi atau F-16. Pesawat Hawk yang ada saat ini tidak layak tempur karena tidak mampu untuk melakukan intersepsi dan kalah cepat bahkan oleh pesawat jenis Boeing. Kenyataannya, jumlah gelar kekuatan Sukhoi dan F-16 kurang memadai, dan dari jumlah yang ada, sebagian sudah tidak layak pakai/tempur karena dalam kondisi rusak atau perawatan.

- Radar, sebagai satu-satunya unsur hanud yang melekat, yang ada di Jawa semuanya tahun 1970.
 - Unsur rudal, sejak tahun 1970 sudah tidak ada.
- c. Belum optimalnya *network* yang terintegrasi secara *real time* antara Kemlu, Mabes TNI dan Kohanudnas untuk korelasi penentuan laporan sasaran (lasi X). Penambahan anggaran dana pertahanan udara nasional harus diiringi dengan perombakan sistem dan koordinasi antar lembaga atau instansi terkait agar lebih terintegrasi

H. KOMANDO OPERASI ANGKATAN UDARA I

1. Komando Operasi Angkatan Udara I atau Koopsau I merupakan pelaksanaan operasi TNI di daerah yang bertugas menyelenggarakan pertahanan terpadu dalam menghadapi kontijensi berdasarkan tugas pokok yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ancaman potensial serta faktual yang mungkin terjadi di wilayah Indonesia Bagian Barat. Selain itu, Koopsau I bertugas mendukung operasi PPRC TNI baik personel maupun materil yang tergabung dalam Satlakopsud

2. Kekuatan unsur udara Koopsau I saat ini

No	SATUAN	PESAWAT	KEKUATAN	SIRKULAS	SASARAN	SIAP
1.	Skadron 1	HAWK 109/209	18	12	8	4
2.	Skadron 2	F-27 TS	5	5	3	1
		CN-235	6	5	3	1
3.	Skadron 6	NAS-332	3	3	2	1
4.	Skadron 7	BELL-47G	11	10	8	7
		EC-120 B	12	12	9	7
5.	Skadron 8	SA-330	7	6	4	1
6.	Skadron 12	HAWK 109/209	15	10	7	3
7.	Skadron 17	F-27 V	1	1	1	0
		F-28V	3	3	2	2
		C-130 V	2	1	1	1
		B-737 V	1	1	1	1
		NAS-332 V	5	5	4	2
8.	Skadron 31	C-130 H/HS	9	7	5	3
9.	Skadron 32	C-130 B/H	9	6	4	3

3. Kekuatan unsur udara dalam Satlakopsud untuk mendukung PPRC
- a. Unsur Intai Udara Taktis : 1 pswt B-737 (Skadron 5)
 - b. Unsur Tempur Udara : 1 flight Hawk 100/200 (3 pswt)
 - c. Unsur Angkutan Udara :
 - 6-8 pswt C-130 (Skadron 31 dan 32 hanya untuk mendukung 1 Yonif Minus)
 - 2 pswt CN-235/F-27 TS
 - d. Unsur SAR : 1 Helikopter

Kekuatan unsur udara yang dibutuhkan dalam Satlakopsud untuk mendukung PPRC adalah:

- a. Unsur Intai Udara Taktis : 2 pswt B-737 (Skadron 5)
- b. Unsur Tempur Udara : 2 flight Hawk 100/200 (6 pswt)
- a. Unsur Angkutan Udara : • 20 pswt C-130 (untuk Yonif Satpur Linud)
atau
• 60 pswt C-130 (untuk Brigif satpur Linud)
• 4 pswt ZCN-235/F-27 TS
- c. Unsur SAR : 2 Helikopter

4. Dengan melihat gelar kekuatan yang ada, Kondisi alutsista atau materiil khusus lainnya dalam Koopsau I tidak memadai untuk memenuhi standar *minimum essential force* (MEF).

- a. Jumlah pesawat yang ada dari berbagai jenis sangat minim sehingga perlu diberikan anggaran tambahan untuk membeli pesawat, baik pesawat intai, pesawat tempur, pesawat angkut maupun untuk kepentingan SAR maupun untuk memenuhi kebutuhan materiil atau alutsista lainnya.
- b. Dengan kondisi yang ada, Koopsau I hanya siap mendukung PPRC TNI secara terbatas sesuai dengan kemampuan alutsista yang ada
- c. Satlak operasi udara hanya mampu mendukung satu trouble spot sebanyak 1 yonif minus

I. RESIMEN ARHANUD-1/FALATEHAN

1. Resimen Arhanud-1/Falatehan merupakan satuan ajaran Kodam Jaya yang sekaligus juga sebagai unsur Kohanudnas dengan tugas melindungi obyek vital di wilayah Ibukota Jakarta. Resimen Arhanud-1/Falatehan didukung oleh 3 satuan unsur pelaksana (Yonarhanudse-6, Yonarhanudse-10 dan Denarhanud Rudal 003 dengan tugas-tugasnya yang meliputi:

- a. Dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam Jaya.
- b. Dalam rangka Kohanudnas: Melindungi obyek vital yang berada di wilayah Ibukota Jakarta, meliputi

No	Satuan/Obvit	Lokasi	Luas	Kekuatan Satbak	
				Minimal	Nyata
1.	Yonarhanudse-6	Tj.Priok			
	- Stasiun pengendalian utama satelit Palapa	Cibinong	91.492 m2	3	3 (tanpa AKT)
	- Stasiun Pemancar RRI	Cimanggis	1.870.000 m2	3	3 (tanpa AKT)
	- Depo Pertmamina	Plumpang	30.000 m2	3	3 (tanpa AKT)
	- Pelabuhan Tj. Priok	Jak-ut	1.200.000 m2	3	3 (tanpa AKT)
2	Yonarhanudse-10	Bintaro			
	- Mabes TNI	Cilangkap	250.000 m2	3	3 (RET)
	- Lanud Halim PK	Cawang	1.980.000	3	3

			m2		
	- Gedung MPR/DPR	Senayan	24.000 m2	3	3 (untuk 2 obvit)
	- Stasiun TVRI Pusat	Senayan	80.000 m2	3	
3	Denarhanud Rudal 003	Cikupa			
	- Istana Negara	Jak-Pus	45.000 m2	6	4 (prioritas)
	- Bandara Suta	Cengkareng	3.750.000 m2	3	2
	- Puspitek	Serpong	85.000 m2	3	2

2. Beberapa permasalahan yang dimiliki oleh Resimen Arhanud-1/Falatehan adalah:

- a. Dari aspek personel secara kuantitas sudah terpenuhi, namun secara kualitas masih belum sesuai TOP/DSPP
- b. Materi Alutsista dan kesejahteraan tidak memadai
 - Yonarhanudse hanya mampu melindungi 1 obvit dari 3 obvit yang menjadi tanggungjawabnya
 - Yonarhanudse-10 hanya mampu melindungi 2 obvit dari 4 obvit yang menjadi tanggungjawabnya
 - Denarhanud Rudal 003 hanya mampu melindungi 2 obvit dari 3 obvit yang menjadi tanggungjawabnya
 - Jumlah Munisi yang ada tidak maksimal untuk melaksanakan operasi dan diperhitungkan hanya mampu melaksanakan operasi 1 (satu) hari dalam kondisi perang yang sebenarnya
 - Kendaraan: Kondisi kenadaraan taktis penarik meriam banyak yang siap operasional, tidak didukung oleh kendaraan angkut personel di satuan sehingga dalam dukungan personel, terpaksa menggunakan kendaraan penarik meriam.
 - Dari alutsista yang dimiliki, yaitu meriam 57mm s-60, secara jumlah dan kualitas kesiapan ops maupun karakteristik kemampuan senjata tidak efektif untuk digunakan dalam mengemban misi kohanudnas yang masih menggunakan teknologi manual sehingga tidak efektif untuk menghadapi ancaman serangan udara yang menggunakan teknologi mutakhir.
 - Untuk meriam 23mm ZUR komposit rudal POPRAD, alut sista ini memiliki karakteristik dan kemampuan yang seimbang/efektif untuk menghadapi ancaman serangan udara saat ini namun dari segi kuantitas masih harus ditambah agar dapat melindungi obvit yang menjadi tanggungjawab satuan
 - Pangkalan dan Rumah Dinas belum memadai dengan masih terdapatnya 154 anggota yang mengontrak di luar asrama, terdiri dari:
 - Mamenarhanud-1/F : 62 anggota
 - Yon-6 : 15 anggota
 - Yon-10 : 77 anggota
- c. Kondisi sarana komando dan pengendalian Opshanudnas
 - Belum tergelarnya sarana komunikasi secara langsung dari kosek hanudnas ke poskodahanud

- Alat komunikasi yang dimiliki oleh resimen dan satuan jajaran memiliki kemampuan terbatas, tidak bisa on line dengan alkom yang di gelar di kosek hanudnas.
 - Kondisi sarana kodal yang ada saat ini berupa radio SSB belum dirancang dan diuji dalam kesiapan operasi sehingga kurang efektif mendukung gelar satbak arhanud dalam kohanudnas.
- d. Permasalahan yang kerap muncul dalam latihan adalah sulitnya mencari medan latihan yang memadai baik untuk latihan taktis maupun latihan menembak senjata berat.
3. Terkait dengan permasalahan yang terjadi di Resimen Arhanud-1/Falatehan disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
- a. Pemenuhan jumlah alutsista yg memadai termasuk dukungan munisinya serta peningkatan kesejahteraan personel
 - b. Alut sista meriam 57 mm atau s-60 yg dimiliki oleh satuan jajaran Menarhanud-1/F Dam Jaya saat ini perlu diganti dengan sejenis rudal jarak pendek yang ditempatkan di atas kendaraan atau *multi mobile launcher* dan jenis rudal portable yang dapat dipanggul dan dioperasikan. Untuk itu, perlu ada dukungan tambahan anggaran untuk pengadaan rudal tersebut.
 - c. Untuk Denarhanus Rudal 003 perlu ditambah agar dapat memadai dalam memberikan perlindungan obvit yang menjadi tanggungjawabnya
 - d. Fasilitas sarana komunikasi yang terintegrasi antara satuan dalam jajaran Menarhanud-1/F dengan unsur-unsur Kohanudnas
 - e. Perlunya kebijakan agar dalam pembangunan wilayah disinkronisasikan dengan aspek pertahanan udara untuk mengatasi permasalahan dalam menuntukan posisi gelar satbak-satbak alutsista arhanud di wilayah perkotaan. Untuk itu, perlu ada kesepakatan yang dibuat oleh TNI, pemda dan masyarakat dimana hasil kesepakatan tersebut dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah.

J. BATALTON KAVALERI 7 PANSER KHUSUS

1. Batalyon Kavaleri 7/Sersus (Yonkav 7/Sersus) Kodam Jaya merupakan salah satu satuan jajaran Kodam Jaya yang berkedudukan langsung di bawah kendali dan komando Pangdam Jaya, sehingga pelaksanaan kegiatan satuan baik program maupun non program selalu berpedoman kepada program kerja Kodam Jaya dan kebijakan Pangdam Jaya.
2. Tugas pokok dari Yonkav 7/Sersus adalah melaksanakan operasi pertempuran darat yang bersifat mobil dilengkapi dengan kendaraan tempur panser dengan titik berat pada operasi pengintaian dan pengamanan serta melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Pangdam seperti tugas dalam misi perdamaian PBB atau pemeliharaan perdamaian dunia
3. Kondisi Alutsista
 - a. Kendaraan Tempur yang ada dalam kondisi baik dan siap pakai hanya 57,89% dengan rincian

NO	JENIS MATERIIL	TOP	RIIL	KONDISI		
				B	RR	RB
1	Ranpur Komando	6	6	4	1	1
2	Ranpur Intai	18	16	8	5	3
3	Ranpur Kanon	12	10	4	3	3
4	Ranpur AP	18	25	17	7	1
	Jumlah	54	57	33	16	8

Dari 57 unit ranpur yang dimiliki, 14 unit ranpur berada di Libanon

b. Persenjataan

NO	JENIS MATERIIL	TOP/DSPP	NYATA	KONDISI		
				B	RR	RB
1	PISTOL - Pindad Kal 1	37	13	13	-	-
2	PISTOL a. P1 Pindad b. Pistol Mitraliur	69 104	164 -	164 -	- -	- -
3	SENAPAN a. FNC Kal 5,56 mm b. Senapan Launcher	352 18	273 -	249 -	23 -	1 -
4	SMS. 30 a. M 60 PSU b. M 60 Coax	3 - -	83 41 42	49 20 29	6 2 4	28 19 9
5	SMB - Brow T.50	6	33	18	2	13
6	KANON - Kanon Kal 90 mm	12	10	6	1	3

c. Alat Komunikasi

NO	JENIS MATERIIL	MERK	SATUAN	JML	KONDISI		
					B	RR	RB
1	Radio dukung FM	AN PRC-77	Unit	43	37	6	1
2	Radio dukung FM	AN PRC 1077	Unit	19	19	-	-
3	Radio PHILLIPS	AN VRC 4623	Unit	39	4	20	15
4	Radio	VRC 64	Unit	1	-	-	1
5	Hand Set	-	Buah	35	-	-	35
6	Antene Batang	AT-271/PKC	Buah	42	42	-	-
7	Antene Ranpur	-	Buah	38	38	-	-
8	Base Antena	-	Buah	43	36	-	7
9	Helmet	-	Set	53	-	-	53

10	HT Motorola Moto Robo Xir P8268		Buah	22	22	-	-
11	HT Motorola GP 300	-	Buah	3	3	-	-

4. Satuan Yonkav 7/Sersus telah melaksanakan tugas-tugas pada misi perdamaian dunia sebagai berikut:
 - a. Kontingen Garuda III di Kongo-1963, dengan menggunakan ranpur ex Inggris (Ferret, Saracean, Saladin)
 - b. Kontingen Garuda XII di Kamboja -1993, dengan menggunakan ranpur V-150 kekuatan 1 kompi panser
 - c. Kontingen Garuda XXIII-A di Libanon (2006-2007) dengan menggunakan ranpur VAB-NG
 - d. Kontingen Garuda XXIII-B di Libanon (2007-2008) dengan menggunakan ranpur VAB-NG
 - e. Kontingen Garuda XXIII-C dan FHQSU XXVI-A/ UNIFIL di Libanon (2008-2009) dengan menggunakan ranpur ranpur VAB-NG
 - f. Kontingen XXIII-D, FHQSU XXVI-B dan XXIII-C1/ UNIFIL di Libanon (2009-SEKARANG dengan menggunakan ranpur VAB-NG

5. Permasalahan yang dihadapi Yonkav-7/Sersus dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya dalam melaksanakan misi perdamaian PBB, adalah sebagai berikut
 - a. Usia pakai ranpur sebagian besar sudah dalam kondisi tua dan tidak berfungsi secara optimal. Hal ini terbukti pada saat peninjauan tim komisi PBB pada tahun 2006, 24 unit ranpur V-150 (produk tahun 1971 dan masuk Indonesia tahun 1976) yang telah disiapkan untuk misi perdamaian internasional dinyatakan tidak memenuhi standar materi dan operasi sehingga diganti dengan jenis VAB (produk tahun 1991 dan masuk Indonesia tahun 1996) dari 14 unit ranpur VAB-NG (M) asset Yonkav 7/Sersus dan 32 unit VAB-NG(AT) yang merupakan aset TNI
 - b. Kondisi persenjataan, baik perorangan maupun ranpur, juga dinyatakan dalam kondisi tidak siap operasional
 - c. Alat komunikasi pada ranpur juga dapat berfungsi dengan baik. 53 Helmet yang merupakan aset Yonkav-7/Sersus dan berfungsi sebagai alat komunikasi semuanya dalam kondisi tidak berfungsi
 - d. Tidak tersedianya alat perlengkapan khusus perorangan di satuan seperti GPS, teropong bidik, kaca mata, sarung tangan, pelindung lutut dan siku, helm 2 in 1, rompi serbu, rompi anti peluru dan holster serta tidak adanya perlengkapan workshop yang memadai.
 - e. Adanya keterbatasan dukungan suku cadang otomotif, alat komunikasi dan senjata.
 - f. Terbatasnya medan latihan yang akan digunakan sebagai tempat latihan mengemudi ranpur bagi prajurit.
 - g. Pengetahuan dan pemahaman personel dalam bidang komputer, bahasa internasional, hukum HAM dan humaniter serta HIV/AIDS masih rendah

6. Terkait dengan kondisi yang ada di Yonkav-7/Sersus maka disampaikan saran-saran sebagai berikut:
 - a. Mohon diadakan perbaikan secara menyeluruh terhadap ranpur yang ada, meliputi sistem otomotif, sistem senjata dan sistem komunikasi atau adanya pengadaan ranpur baru bagi satuan yonkav 7/sersus
 - b. Adanya pemenuhan terhadap seluruh kebutuhan alat perlengkapan khusus perorangan
 - c. Adanya pemenuhan terhadap peralatan workshop yang memadai

IV. SARAN DAN REKOMENDASI TINGKAT LANJUT

Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi DKI Jakarta, Tim menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

A. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI:

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

1. Komisi I DPR RI akan menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai kondisi fasilitas kesekretarian dan organisasi KIP yang tidak layak dan tidak mendukung bagi kelancaran tugas pokok (daya listrik di KIP turun dan lampu mati ketika DPR melaksanakan kunjungan), fungsi maupun wewenang KIP serta pembenahan dalam struktur kesekretariatan untuk tidak lagi berada di bawah kementerian ini. Tenaga kesekretariatan yang ada merupakan PNS dari Kementerian Komunikasi dan Informasi sehingga menimbulkan opini bahwa KIP merupakan bagian dari satuan kerja Kemkominfo sementara Undang-Undang menyatakan bahwa lembaga KIP adalah mandiri.
2. Komisi I DPR RI meminta agar KIP segera mengajukan rencana beserta kebutuhan riel anggaran yang diperlukan kepada DPR RI cq. Komisi I, untuk dapat diperjuangkan kepada Kementerian Keuangan dengan berbasis kinerja dan kompetensi atau adanya sistem yang terintegrasi dan didukung oleh produktifitas.
3. Komisi I DPR RI akan minta kepada pemerintah, cq. Kemkominfo untuk segera menyusun aturan teknis mengenai informasi-informasi yang dikecualikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi seluruh pihak baik badan publik maupun masyarakat yang berkepentingan dengan informasi publik.

B. BIDANG PERTAHANAN:

1. Reformasi dan demokratisasi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan dalam tubuh TNI. Reformasi dalam TNI telah berjalan sangat baik dan TNI kini tengah menuju pada sebuah institusi yang profesional dan mandiri. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diselesaikan. Tinjauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa seluruh unsur TNI, mulai tingkat pusat hingga satuan operasional menghadapi kendala minimnya anggaran untuk alutsista dan kesejahteraan (tunjangan hidup dan fasilitas perumahan). Terkait dengan hal tersebut Komisi I DPR RI memiliki komitmen kuat untuk mendukung TNI, khususnya dalam sektor peningkatan

kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan alutsista, setidaknya hingga memenuhi standar *minimum essential force* sehingga pertahanan negara menjadi sangat kuat, disegani serta memiliki efek *deterrence* bagi negara lain.

2. Dalam rangka untuk mencapai kondisi MEF, TNI harus lebih memprioritaskan penggunaan produk alutsista dalam negeri guna menunjang pertumbuhan industri teknologi militer dalam negeri kecuali untuk teknologi persenjataan yang spec dan kebutuhannya belum dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri seperti yang digunakan oleh pasukan khusus atau pasukan elit. Di sisi lain, industri dalam negeri (BUMN) strategis yang bergerak dalam bidang pertahanan dan teknologi militer dituntut untuk semakin meningkatkan kemampuan teknisnya sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan yang diinginkan oleh TNI. Pada tahap dimana antara kemampuan teknis BUMNIS/pertahanan belum memenuhi tuntutan standar teknologi alutsista yang dibutuhkan oleh TNI, baik TNI maupun BUMNIS/pertahanan harus mencari penyesuaian sehingga dapat menemukan titik equilibrium. Kualitas dan spec teknologi produk tersebut kemudian secara bertahap ditingkatkan hingga mencapai kualitas teknologi maksimal seperti yang dikehendaki oleh TNI sebagai user.
3. Terkait dengan optimalisasi penggunaan alutsista produk dalam negeri tersebut, mekanismenya harus dilakukan secara terintegrasi dan dibahas secara bersama antara BUMNIS/BUMNIP, Kemhan dan Mabes TNI yang mewakili satuan-satuan TNI secara keseluruhan. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak temuan di lapangan yang menunjukkan sebagian alutsista produk dalam negeri yang diberikan pada TNI tidak berfungsi atau tidak beroperasi dengan baik dan akibatnya, hanya menjadikan prajurit TNI sebagai korban.
4. Sebagai bagian dari penciptaan mekanisme koordinasi integratif, dukungan terhadap pertumbuhan industri pertahanan dan optimalisasi penggunaan alutsista produk dalam negeri, maka terkait BUMNIS/BUMNIP, perlu dilakukan perombakan yang meliputi:
 - a. Secara ex-officio, komisaris BUMNIS adalah TNI
 - b. BUMNIS berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan
 - c. Presiden memberikan payung hukum untuk melakukan penunjukan langsung kepada BUMNIS dalam pengadaan alutsista yang dibutuhkan TNI tanpa melalui mekanisme tender
5. Terdapat perbedaan pemenuhan alutsista baik secara kuantitas maupun kualitas antara TNI sebagai user dengan kebijakan yang ditetapkan dimana alutsista yang direncanakan atau dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan TNI. Dalam hal ini, Komisi I DPR RI meminta kepada Panglima TNI untuk mengirimkan data mengenai kebutuhan seluruh alutsista beserta anggarannya (hingga satuan tiga) kepada Komisi I DPR RI sehingga Komisi I dapat memperjuangkannya kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan mengenai belanja barang sesuai yang dibutuhkan oleh TNI sebagai user serta melakukan pengawasan terhadapnya.

6. Dalam menyampaikan usulan rencana anggaran kepada Komisi I DPR, TNI diharapkan tidak menyampaikannya berdasarkan rencana anggaran pertahun namun berdasarkan renstra 5 (lima) tahunan dengan mekanisme pembayaran *multiyears*. Sehingga dengan demikian, produk alutsista akan datang sesuai dengan kebutuhan waktu pemakaian, teknologi yang masih *up-to-date* namun dengan harga yang lebih murah. Demikian juga pembelian alutsista dari luar negeri dengan menggunakan mekanisme kredit ekspor (KE) disusun berdasarkan renstra 5 (lima) tahunan. Karena mekanisme KE membutuhkan jalur dan birokrasi yang panjang dan biaya tinggi, perlu dibuat simulasi agar proses KE semakin cepat dengan cara memotong jalur-jalur yang tidak perlu sehingga dapat menghemat anggaran dan waktu.
7. Perubahan yang kerap kali terjadi dalam tubuh TNI berdampak pada kendala teknis anggaran dimana ketetapan yang sudah ada diubah baik oleh satuan-satuan yang ada maupun oleh Mabes TNI. Ke depan, TNI harus memiliki ketegasan atau komitmen untuk tidak melakukan perubahan yang berdampak pada perubahan anggaran. Dinamika operasional maupun organisasi harus diarahkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Perubahan yang dilakukan tidak sesuai rencana harus dikenakan penalti atau sanksi.
8. Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk menunjang kerja teknis administratif di lingkungan TNI sangat banyak dan menyerap anggaran belanja yang ada. Keberadaan mereka harus dipertimbangkan untuk ditempatkan pada salah satu lembaga atau kementerian lain diluar Dephan atau Mabes TNI sehingga tidak menyerap anggaran pertahanan yang ada. Alternatif lain adalah, belanja pegawai tersebut dikecualikan dari anggaran yang ada sehingga anggaran yang ada dapat difokuskan untuk belanja barang semata.
9. Beban anggaran belanja yang dianggarkan banyak tersalurkan untuk barang-barang yang sudah tidak produktif. TNI harus menyusun "hapus buku" yang ditujukan kepada Menteri Keuangan terkait barang-barang yang sudah tidak digunakan sehingga tidak membebani anggaran untuk pembayaran pajak.
10. Selain persoalan alutsista, Komisi I DPR RI juga meminta kepada Mabes TNI dan satuannya untuk menyampaikan data lengkap mengenai persoalan rumah dinas, lahan serta jumlah prajurit yang belum memiliki rumah dinas kepada Komisi I DPR RI cq. Panja Aset Tanah dan Rumah Dinas sebagai acuan bagi Panja dalam merumuskan kebijakan terkait penyediaan rumah dinas bagi prajurit TNI.
11. Terkait dengan masih adanya embargo dari negara-negara lain terhadap Indonesia mengenai teknologi dan produk persenjataan untuk kebutuhan kelengkapan alutsista yang belum mampu diproduksi oleh industri dalam negeri, Komisi I DPR RI akan meminta pemerintah, cq. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan maupun kementerian lain yang terkait untuk melakukan lobi-lobi dan pendekatan diplomatik persuasif dan intensif agar embargo tersebut dapat dicabut serta meningkatkan kerjasama teknik militer dengan negara-negara lain.